

Bertahan di Tengah Perubahan: Sejarah Diaspora Hadrami di Sumenep-Madura Pada 1832-1901

Rahmat Hidayat, Ahmad Athoillah

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Email: rahmathidayat1997@mail.ugm.ac.id, ahmad.athoillah@mail.ugm.ac.id

Abstract

This article aims to narrate historically the social transformation and economic behavior of the Arab-Hadrami colony in Sumenep. Therefore, a socio-economic historical approach is employed in this research. The researcher engages in archival accuracy, synthesizing data, and presenting it within a historiographical framework. The study findings reveal that the formation of the Arab colony in Sumenep is attributed to the paternalistic relationship established between Arab-Hadrami traders and Sultan Abdurrahman. Socially and religiously based relationship facilitated the migration of Arab traders to Sumenep while also creating economic prosperity for them. However, following the Sultan's demise, the social ties between the Sumenep nobility and Arab traders began to diminish. Secondly, the colonial government's reorganization of Sumenep successfully opened up the island of Madura to the international market through the salt commodity. On the other hand, the reorganization of Sumenep stimulated the mobility of Arab-Hadrami trade, opening up new economic spaces such as maritime trade and salt transportation, and establishing capitalist relationships with Sumenep nobility through credit.

Keywords: *Adaptation, Arab-Hadrami, Change, Economy, Relation*

Pendahuluan

Selat Madura menjadi “laut keluarga” yang digunakan untuk lalu lintas pelayaran dan perdagangan laut yang menghubungkan bagian barat dan bagian timur dari kepulauan Nusantara. Sebagai jalur persimpangan bagi perdagangan, Selat Madura menjembatani terjadinya perluasan kekuasaan politik, penyebaran agama, dan budaya. Di bibir Selat Madura terdapat kota-kota pantai yang menjadi sumbu perdagangan. Salah satunya adalah Sumenep yang memiliki bandar internasional yaitu Pelabuhan Kalianget.¹

Sebagai bandar perdagangan Pulau Madura, Sumenep tentunya memiliki daya tarik bagi pedagang-pedagang Asing seperti pedagang Arab-Hadrami. Sebagai kota-kota pantai lainnya, penduduk Sumenep pada awal abad ke-19 merepresentasikan masyarakat yang heterogen. Menurut J. Hageman dalam *Tjiptoatmodjo*, orang-orang Timur Asing telah menempati Sumenep. Pada 1815, tercatat Sumenep dihuni oleh 114.896 pribumi, 8.528 Cina, dan 680 Arab, India dan sebagainya.²

¹Fransiscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo, *Kota-Kota Pantai Di Sekitar Selat Madura: Abad XVII Sampai Medio Abad XIX (Disertasi)* (Yogyakarta: Ilmu Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1983), 16.

²Tjiptoatmodjo, 14.

Kedatangan pedagang Arab-Hadrami di Sumenep mendapatkan momentumnya pada masa kepemimpinan Sultan Abdurrahman/Sultan Pakunataningrat I (1811-1854). Hal ini disebabkan raja Sumenep memiliki status politik yang inklusif bagi pedagang Arab-Hadrami sehingga mereka bermigrasi dan menjalin hubungan patronase dengan raja Sumenep. Pada puncaknya, mereka membentuk sebuah komunitas yang eksklusif di Sumenep pada 1832 yang menjadi titik awal pembahasan artikel ini.

Pada masa Sultan, interaksi pedagang Arab-Hadrami dengan Aristokrat mencerminkan relasi patrimonial. Akan tetapi, ketika Sultan Sumenep mangkat dan pemerintah kolonial menerapkan reformasi administratif di Sumenep pada 1833, hubungan keduanya mengalami perubahan. Di samping itu, pembukaan ekonomi Madura kemudian memberikan pengaruh dan stimulus ekonomi bagi diaspora Arab sehingga mereka dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi

Berangkat dari persoalan itu, artikel ini berupaya untuk menelaah perilaku sosial-ekonomi komunitas Hadrami di Sumenep dalam merespon perubahan sosial yang terjadi di Sumenep pada abad ke-19. Guna mempermudah memahami pokok permasalahan di atas, artikel mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, mengapa orang-orang Arab-Hadrami memilih Sumenep sebagai tempat untuk berdiaspora? Kedua, bagaimana adaptasi mereka dengan perubahan yang terjadi di Sumenep?

Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial-ekonomi. Menurut Sartono Kartodirdjo, seluruh proses sejarah merupakan representasi dari suatu perubahan sosial yang multidimensional. Perubahan sosial itu adalah gejala yang inheren dalam setiap perkembangan suatu kelompok atau masyarakat. Secara organis, apa yang mengalami perubahan dalam suatu komunitas tidak hanya dibatasi pada peningkatan kuantitas kelompok, tetapi berfokus juga pada peningkatan kemampuan dan adaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.³

Disamping itu, sejarah sosial memiliki keterkaitan erat dengan sejarah ekonomi.⁴ Dalam penelitian ini, perilaku sosial-ekonomi Hadrami di Sumenep dipahami sebagai fungsi adaptasi (ekonomi), integrasi (sosial), mempertahankan diri (budaya), dan memberi orientasi tujuan (politik).⁵ Dari pendekatan di atas, penelitian ini menempuh metode penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi,

³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 160–62.

⁴Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 39.

⁵Bambang Puwanto, Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, *Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model, Dan Tantangannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 163.

interpretasi dan historiografi.⁶ Arsip-arsip kolonial, karya LWC van den Berg, dan Babad Sumenep menjadi sumber primer bagi penelitian ini

Selanjutnya, tujuan artikel ini adalah untuk mengisi kekosongan historiografis mengenai komunitas Hadrami di Sumenep. Hal ini disebabkan kajian kontemporer mengenai Sejarah Madura didominasi oleh tema Pesantren, Santri/Kiai dan Nahdlatul Ulama (NU).⁷ Disamping itu, kajian mengenai etnis Tionghoa-Madura relatif memadai daripada kajian mengenai Hadrami.⁸ Tujuan kedua adalah berupaya merekonstruksi sejarah diaspora Arab-Hadrami yang bukan hanya seorang pedakwah agama saja.

Kajian mengenai sejarah sosial Hadrami di Sumenep belum mendapatkan porsi yang proporsional dalam historiografi Madura. Selain itu, penulisan sejarah diaspora Hadrami di Nusantara hanya terfokus pada kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Gresik, Pekalongan, Yogyakarta, dan Solo. Ahmad Athoillah mendiskusikan tentang pembentukan identitas sosial Hadrami di Jakarta abad 18 sampai 20.⁹ Rizal Nasser dan Sulasman membahas mengenai perkembangan sosial-ekonomi Hadrami di Pekojan-Jakarta pada masa kontemporer.¹⁰ Karya Fatiyah mendiskusikan peleburan identitas ke-Arab-an komunitas Arab dengan identitas ke-Jawa-an pada abad 20.¹¹ Sementara itu, buku Artono membahas tentang sejarah komunitas Hadrami di Surabaya pada awal abad ke-20.¹² Sudut pandang mengenai gerakan politik Hadrami di Nusantara dapat ditemukan dalam karya Natalie

⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 73–82.

⁷ Yanwar Pribadi, “Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture,” *Al-Jami’ah* 51, no. 01 (2013): 1–32; Yanwar Pribadi, “The Suramadu Bridge Affair: Un-Bridging the State and the Kyai in New Order Madura,” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, no. 2 (2015): 233–67; dan Ahmad Fathan Aniq Abd A’la, Mukhammad Zamzami, dan Nur Hidayat Wakhid Udin, “Islamism in Madura: From Religious Symbolism to Authoritarianism,” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 02 (2018): 159–93; Iik Arifin Mansurnoor, “Local Initiative and Government Plans: ‘Ulama’ and Rural Development in Madura Source,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 7, no. 1 (1992): 69–94, <https://www.jstor.org/stable/4105712>; Abdul Gaffar Karim, “The Pesantren-Based Ruling Elite in Sumenep in The Post-New Orde Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 03, no. 01 (2009): 97–121.

⁸Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*, ed. JJ. Rizal, III (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2017); Akhmad Siddiq, *Kristen Madura: Agama, Identitas, Dan Pergulatan Sosial* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021).

⁹Ahmad Athoillah, “Pembentukan Identitas Sosial Komunitas Hadrami Di Batavia Abad XVIII-XX,” *Lembaran Sejarah* 14, no. 2 (2018): 150–70.

¹⁰Rizal Nasser Sulasman, “Perkembangan Komunitas Arab Di Indonesia: Studi Kasus Perkampungan Masyarakat Arab Di Pekojan Jakarta Barat Pada Tahun 1950-2018,” *Historia Madania* 04, no. 02 (2020): 247–68.

¹¹Fatiyah, *Sejarah Komunitas Arab Di Yogyakarta Abad XX*, ed. Priyo Sudarmo (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2016).

¹²Artono, *Komunitas Arab Di Kota Surabaya 1900-1942*, ed. Siti Zaenatul Umaroh (Temanggung: Penerbit Kendi, 2021).

Mobini-Kesheh, Amin Subarkah, Akmal Aji Hidayatullah dan Yusril Fahmi Adam, Rabith Jihan Amaruli, Husain Haikal dan Hamid Algadri.¹³

Hasil dan Pembahasan

Lanskap Sosial-Ekonomi Sumenep Abad ke-19

Sumenep merupakan wilayah paling timur di Pulau Madura. Ia memiliki bandar perdagangan yang cukup ramai yaitu Pelabuhan Kalianget. Sebagai salah satu kota pantai utama di Selat Madura, banyak pedagang asing yang masuk ke Sumenep pada awal abad ke-19. Pada masa Raffles, penduduk Sumenep telah merepresentasikan masyarakat heterogen yang terdiri dari 105,305 pribumi, 1040 Tionghoa, 247 orang Melayu dan Bugis, 680 jiwa Arab dan India, kemudian 327 jiwa orang Eropa.¹⁴ Menurut Denys Lombard (1996), masyarakat majemuk yang berciri utama agama Islam telah lama terbentuk di kawasan pantai-pantai Nusantara. Masyarakat yang menetap di pesisir mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pelaut, pengakut, dan pedagang.¹⁵

Berdasarkan catatan Jenderal Clark, pada 31 Desember 1813, Kalianget sudah membangun hubungan perdagangan dengan wilayah Jawa dan luar Jawa. Beberapa-bepa barang perdagangan yang diekspor dari Sumenep ke Jawa dan Luar Jawa sangat beragam di antaranya garam, ikan asing, anyaman rotan, kain, asam jawa, pot, tembakau, kapur, kacang boco, agar-agar, minyak jarak dan sebagainya.¹⁶ Pada pertengahan abad ke-19, Madura mengalami transformasi sosial ekonomi sebagai dampak dari ekspansi kapitalisme yang berkembang di Pulau

¹³Natalie Mobini-Kesheh, *The Hadrami Awakening: Community and Identity in The Netherlands East Indies, 1900-1942* (New York: Southeast Asia Program Publications, 1999); Amin Subarkah, *Pengaruh PAN-Islamisme Terhadap Kebangkitan Golongan Arab Di Jakarta, 1901-1941 (Tesis)* (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1990); Akmal A J I Hidayatullah and Yusril Fahmi Adam, "Gerakan Islam Modern Komunitas Arab Di Solo, 1912-1942," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 19, no. 2 (2022): 132-44, [https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2.](https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2.;); Singgih Tri Sulistiyono Rabith Jihan Amaruli, Nazala Noor Maulany, "Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang-Orang Arab-Hadrami Di Indonesia," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 03, no. 02 (2018): 121-32; Husain Haikal, *Indonesia-Arab: Dalam Pergerakan Kemerdekaan*, ed. Machin Muqoddam (Yogyakarta: FORUM, 2019); Mr. Hamid Algadri, *Islam Dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, III (Bandung: Mizan, 1996).

¹⁴Thomas Stamford Raffles, *The History of Java Volume One* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), 73; Tjiptoatmodjo, *Kota-Kota Pantai Di Sekitar Selat Madura: Abad XVII Sampai Medio Abad XIX (Disertasi)*, 289.

¹⁵Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 87.

¹⁶*An Annual Statement of the Export and Import to Java and Islands beyond Java at The Port of Sumanap for the Year 1813*, dalam *Arsip Madoera*, ANRI, Nomor Inventaris: K25, Nomor Arsip. No. 7.

Jawa. Perubahan itu ditandai dengan penerapan pemerintahan langsung dan kerajaan Sumenep dihapuskan pada November 1883.¹⁷

Reformasi administrasi ini bertujuan untuk memuluskan agenda liberalisasi ekonomi Pemerintah kolonial atas wilayah koloninya. Intervensi langsung terhadap Sumenep memudahkan pemerintah kolonial untuk mengekstraksi potensi ekonomi yang ada (garam). Dengan demikian, neraca perdagangan pemerintah kolonial akan mengalami surplus yang besar.¹⁸

Selanjutnya, reorganisasi sistem politik ini menjadikan perdagangan di Sumenep menjadi lebih ekstensif. Sejak pertengahan kedua abad ke-19, Sumenep menjalin hubungan perdagangan (ekspor-impor) dengan Singapura, Riau, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Banda dan Bima.¹⁹ Ditambah lagi, warung dan toko-toko kecil mulai tumbuh di distrik Kota Sumenep. Berdasarkan catatan kolonial pada 24 Januari 1898, Sumenep memiliki 1149 warung dan pasar sebanyak 32.²⁰

Secara administratif, pada 1879, Sumenep memiliki 14 distrik yaitu Kota Luar, Kota Dalam, Timur Daya, Timur Laut, Barat laut, Barat Daya, Pulau Kangean, Pulau Sapudi, Pulau raa, Pulau Gili Genting, Pulau Giliang, Pulau Poteran, Pulau Tjabia, Pulau Gili Raja.²¹ Sebagian besar mata pencaharian penduduk Sumenep berkisar pada pertanian, pelayaran laut, perikanan, peternakan, dan perdagangan terutama perdagangan eceran

Kondisi sosial-ekonomi Sumenep dipengaruhi oleh dua ekosistem yakni tegalan dan pesisir. Masyarakat Sumenep yang tinggal di bagian selatan mayoritas bekerja sebagai petani garam, nelayan dan pelayaran. Mata pencaharian mereka yang tinggal di bagian dalam beradaptasi dengan ekologi tegalan, sehingga mayoritas mereka adalah petani. Walaupun ekonomi Sumenep didominasi oleh pertanian, tetapi ekosistem tegalan di Madura tidak cocok bagi pertanian padi dan tebu. Komoditas tanaman seperti tembakau dan jagung mampu beradaptasi dengan tanah tegalan yang kering dan tandus.²²

¹⁷Pertama kali, sistem swaprja dihapuskan di Pamekasan pada 1858, secara berurut-urut, pemerintahan secara langsung diterapkan di Bangkalan, Sampang dan Sumenep, pada 1885 dan 1883. Lihat penulis Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, ed. Imam Risdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 170, 177, 181; Koloniaal Verslag Van 1885, hlm. 02.

¹⁸Huub de Jonge, *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2011), 21.

¹⁹Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, 137.

²⁰Algemene Verslag van 1897, No. 419/12 C, Bijlagen. 02, dalam *Algenemen Verslag Madoera 1893-1898, 1900-1901, 1906, 1915-1917*, ANRI, Inventaris Arsip Algemene Secretarie Serie Verslagen (1825) 1830-1940, Nomor Arsip 328.

²¹*Gewestelik Bestuur (Madoera)* dalam *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie 1879* (Batavia: Landsdrukkerij, 1913), hlm. 196.

²²Huub de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), 46; Jef Leunissen, "Pertanian Rakyat Di Mudara,"

Pada abad ke-19, Sumenep merepresentasikan kota dagang yang cukup ramai. Beberapa komoditas yang diperjualbelikan adalah kulit, tembakau, minyak, kapuk, gula aren, gula siwalan, gula tarebung dan ikan. Untuk komoditas beras, kapuk, minyak bumi, dan linen sebagian besar dikuasai oleh pedagang China, Arab, dan para Haji. Sumenep juga mengeksport kacang, singkong, ketela, gula lokal, ikan nener, buah-buahan, asam jawa dan ikan asin.²³

Selanjutnya, ekologi pesisir yang meliputi bagian selatan Sumenep memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat Sumenep. Pada abad ke-19, orang-orang pribumi Sumenep sibuk dalam pengangkutan antar-pulau dan kapal-kapal mereka menyusuri pesisir Pantai Utara Jawa dan Banjarmasin. Usaha pelayaran yang dimiliki penduduk lokal Sumenep kemudian bersaing dengan kapal uap milik Eropa.²⁴

Menurut Masyhuri (1995), daerah pesisir Sumenep yang tidak maju dalam pertanian, berhasil mengembangkan usaha penangkapan ikan. Para nelayan di Sumenep menggunakan sistem jemputan/*ngadang*. Ditambah lagi, industri garam di Sumenep sangat membantu dalam usaha pengasinan dan pengawetan ikan.²⁵ Berdasarkan laporan J. Clark kepada Raffles, pada awal abad ke-19, Sumenep telah mengeksport 1.167 pikul ikan asing ke berbagai daerah yang ada di luar Pulau Madura dan Jawa.²⁶

Alam Madura yang panas menguntungkan bagi produksi garam di Sumenep. Sejak akhir abad 19 sampai awal abad 20, Sumenep merupakan wilayah yang sangat maju dalam pengembangan industri garam kolonial. Garam diekstraksi dari tiga tempat yakni Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Kalianget). Untuk mengakselerasi pemasaran garam, pemerintah kolonial membentuk dua maskapai—*Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) dan *Madoera Stroomtram Maatschappij* (MSM) pada akhir abad ke-19.²⁷

in *Agama, Kebudayaan, Dan Ekonomi : Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, ed. Huud de Jonge (Jakarta: Rajawali, 1989), 229–49.

²³Gewestelijk Bestuur van Madoera, No. 2844/12d, Pamekasan, 4 Maart 1916 dalam *Algenemen Verslag Madoera 1893-1898, 1900-1901, 1906, 1915-1917*, ANRI, Inventaris Arsip Algemene Secretarie Serie Verslagen (1825) 1830-1940, Nomor Arsip 328.

²⁴Mr. A. Neijtzell de Wilde, *Inlandsche Bevolking in de Gouvernementslanden van Java En Madoera (Nijverheid, Handel, Bijdragen Aan de Gemeenschap, de Gouvernementsmonopolien, de Algemeene Middelen Tot Bevordering van Den Welvaartstoestand)* (Weltevreden: N. V. Boekh Visser & Co, 1913), 284; Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia*, 98; Joh F. Snelleman, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Vierde Deel* (Leiden: Martinus Nijhoff & E. J. Brill, 1905), 15.

²⁵Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara: Usaha Dan Perekonomian Nelayan Di Jawa Dan Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama & KITLV, 1995), 65–66 & 186.

²⁶*An Annual Statement of the Export and Import to Java and Islands beyond Java at The Port of Sumanap for the Year 1813*, dalam *Arsip Madoera*, ANRI, Nomor Inventaris: K25, Nomor Arsip No. 7.

²⁷Wilde, *Inlandsche Bevolking in de Gouvernementslanden van Java En Madoera (Nijverheid, Handel, Bijdragen Aan de Gemeenschap, de Gouvernementsmonopolien, de*

Realitas historis tersebut menegaskan bahwa ekologi pesisir menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sumenep. Hal tersebut seringkali terlupakan dalam narasi sejarah Madura yang digeneralisasikan dengan sistem ekologi tegalan yang tidak produktif. Adanya dua kekuatan itu menjadikan Sumenep sebagai wilayah strategis bagi aktivitas perdagangan Nusantara. Dari jalur Selat Madura, para pedagang Timur Asing seperti China dan Arab-Hadrami masuk ke pusat ekonomi Sumenep.²⁸

Migrasi Pedagang Hadrami dan Terbentuknya Komunitas Hadrami di Sumenep

Sumenep menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang cukup menonjol di Jawa Timur sejak abad ke-15, sehingga banyak pedagang, dan pelaut muslim Asing yang singgah di pelabuhan Kalianget.²⁹ Gresik merupakan gerbang masuk pedagang muslim Asing ke kota-kota pantai di Madura seperti Sumenep.³⁰ Pengaruh sosial-keagamaan pedagang Arab-Hadrami sejatinya dapat ditelusuri jauh sampai pada periode pengaruh Walisanga dan Kerajaan Demak atas Sumenep pada akhir abad ke-14.³¹

Dalam catatan Raffles disebutkan bahwa Raja Chermen mengutus Sayyid Ja'far ke sebuah kota pantai di Madura untuk menyebarkan Islam, kemudian ia meninggal di sebuah desa Plakara pada abad ke-14.³² Dalam cerita rakyat Sumenep disebutkan pula bahwa pada abad ke-15 seorang pedakwah bernama Sayid Ali Murtadla (*Ratu Pandita*) datang ke Pulau Sepudi-Sumenep untuk menyebarkan ajaran Islam. Setengah abad kemudian (1550-an), Sayid Ahmad Baidhowi menyiarkan Islam ke Sumenep.³³

Algemeene Middel en Tot Bevordering van Den Welvaartstoestand), 132; Parwoto, *Monopoli Garam Di Madura 1905-1920 (Tesis)* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1996), 57; Imam Syafi'i, *Sejarah Garam: Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1981* (Jakarta: LIPI Press, 2021), 10.

²⁸Tjiptoatmodjo, *Kota-Kota Pantai Di Sekitar Selat Madura: Abad XVII Sampai Medio Abad XIX (Disertasi)*, 79.

²⁹Iskandar Zulkarnain, *Sejarah Sumenep* (Sumenep: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, 2012), 67; Proyek Penelitian Madura Kerjasama Indonesia-Belanda, *Madura III: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar 1979* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1979), 101.

³⁰Raffles, *The History of Java Volume One*, 75.

³¹Raden Werdisastra, *Babad Sumenep (Babad Songennen)*, ed. Moh. ThoHa Hadi (Pasuruan: Percetakan Garoeda, 1996), 123-24; Indonesia-Belanda, *Madura III: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar 1979*, 101; TH. Pigeaud H.J. De Graaf, *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV Dan XVI* (Jakarta: Grafiti, 1974), 197.

³²Raffles, *The History of Java Volume One*, 114.

³³Hal yang penting digarisbawahi adalah bahwa raja-raja lokal di Nusantara seringkali menggunakan gelar yang sama dengan kelas bangsawan Arab-Hadrami yaitu "sayid" sekalipun mereka bukan keturunan Arab. Zulkarnain, *Sejarah Sumenep*, 67.

Meskipun kontak ekonomi Sumenep dengan pedagang Arab terjalin sejak masa Walisanga, tetapi proses ekonomi tersebut tidak cukup untuk menjelaskan proses islamisasi pulau Madura. Menurut Mansurnoor (1990), proses islamisasi yang massif di Madura disebabkan oleh terjadi konversi agama yang terjadi di kalangan aristokrat.³⁴ Pada abad ke-19, banyak pedagang elit Hadrami datang ke Keraton Sumenep untuk mengajarkan agama Islam kepada keluarga bangsawan Sumenep. Mereka mengenalkan paradigma Islam Hadadiyah kepada penguasa Islam lokal di Sumenep.

Sultan Abdurrahman/Pakunataningrat I (1811-1854), raja ketiga dari Dinasti Ayutirtanegara di Sumenep, dikenal sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Otoritas religius raja Sumenep ini diejawatahkan dalam bentuk pembuatan sebuah al-Qur'an dalam ukuran yang sangat besar dan ditulis tangan.³⁵ Menurut L.W.C. van den Berg, ketertarikan Sultan kepada bahasa Arab, tasawuf, dan hukum Islam mendorong Sultan untuk mengundang beberapa cendekiawan dari kalangan Arab sayid yaitu Sayid Abdurrahman al-Baiti dan Sayid Syakh bin Ahmad Bafagih.³⁶ Gambar 1. merupakan gambar Sayid bin Ahmad Bafahiq Bersama Raden Muh. Shaleh.

Gambar 1. Sayid Syekh bin Ahmad Bafaqih berdiri di sebelah kanan-belakang bersama Panembahan Natakusuma II (Raden Muh. Shaleh)



Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/>

³⁴Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 09.

³⁵Aufannuha Ihsani, *Kebangsaan Di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep Tahun 1950-an (Tesis)* (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2020), 45; Aufannuha Ihsani, "From The Palace-Pendopo to The Pesantren Rooms : The Dynamics of Aristocrats and a Kiai Relationship in Sumenep 1750-1950s," *Islamuna, Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 1–21; Abdul Latif Bustami, "Santri Sebagai Penguasa: Dinasti Bendara Saud Di Kasultanan Sumenep Abad XVIII," *Pesantren* VII, no. 01 (1990): 66–76.

³⁶L.W.C van den Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, ed. Rahayu Hidayat (Depok: Komunitas Bambu, 2010), 108.

Selain itu, kemajuan transportasi kapal uap, pembukaan terusan Suez serta kemajuan ekonomi kolonial di Jawa memantik terjadinya migrasi pedagang Arab ke Jawa, termasuk Sumenep pada abad ke-19. Perkembangan dunia ekonomi diaspora Hadrami di Hindia-Belanda memunculkan permintaan akan “*syaihta’lim*/pengajar agama” dari Hadramaut untuk memberikan pencerahaan keagamaan bagi para saudagar beserta keluarganya dan keluarga bangsawan.³⁷

Akomodasi sosial-keagamaan Sultan Sumenep menstimulus pedagang Arab untuk menetap. Adapun komunitas dan perkampungan khusus menjadi wadah bagi pembentukan identitas kolektif mereka. Menurut L.W.C van den Berg, sejak tahun 1832, pedagang Arab di Sumenep telah memiliki sebuah perkampungan yang dipimpin oleh seorang kepala koloni Arab. Bahkan, Sebagian orang-orang Arab di Sumenep ini berpindah dan membuat pemukiman cabang baru yang ada di Pulau Pamanukan.³⁸ Akan tetapi, berdasarkan penelusuran arsip, penulis menemukan seorang kepala koloni Arab Sumenep bernama Syarif Thalib bin Ahmad Albakhie, yang diangkat oleh pemerintah pada tahun 1850.³⁹

Kemakmuran didapatkan oleh pedagang Arab selama Sultan Abdurrahman memimpin Sumenep. Sebagai pengasuh bagi keluarga raja Sumenep, Sayid Syakh bin Ahmad Bafaqih mendapatkan gaji yang diambil pajak desa di Sumenep. Selama 25 tahun bersama Sultan, dia mendapatkan tunjangan besar dan gaji pensiun dari putra sulung Sultan yakni Panembahan Mohammad Saleh.⁴⁰ Realitas historis di atas menunjukkan bahwa perkembangan sosial-ekonomi orang-orang Arab-Hadrami di Sumenep didukung oleh patronase yang terbangun dengan penguasa Sumenep.⁴¹

Patronase ini kemudian tidak hanya mengambil bentuk secara sosial-keagamaan saja, tetapi juga membangun hubungan sosial-ekonomi antara Aristokrat Sumenep dengan pedagang Hadrami. Mereka mendapatkan preferensi dari Sultan untuk menarik pajak pertanian kepada para petani garam. Hal ini berlangsung sampai penghapusan sistem swapraja di Sumenep. Peluang untuk menarik pajak pertanian memberikan jalan bagi orang-orang Hadrami untuk melakukan akumulasi kapital bagi perdagangan mereka.⁴²

³⁷Ismail Fajrie Alatas, *What Is Religious Authority: Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah*, ed. Ahmad Baiquni (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2024), 61; Huub de Jonge, *Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami Di Indonesia (1900-1950)*, ed. Arif Bagus Prasetyo (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019).

³⁸Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, 108.

³⁹*Personeel in de Binnenlanden* dalam *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1850*, (Batavia: Ter Landsdrukkerij), hlm. 64

⁴⁰Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, 150.

⁴¹Sumit K. Mandal, *Becoming Arab: Creole Histories and Modern Identity in the Malay World* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2018), 31.

⁴²William Gervase Clarence-Smith, “Entrepreneurial Strategies of Hadrami Arabs in Southeast Asia, C. 1750s-1950s,” in *The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia: Identity Maintenance or Assimilation?*, ed. Ahmed Ibrahim Abushouk dan Hassan Ahmed Ibrahim (Leiden-Boston: Brill, 2009), 153.

Tidak hanya privilege berupa gaji dan lisensi untuk menarik pajak, pedagang Hadrami di Sumenep sudah mendapatkan izin untuk berdagang di pasar-pasar seperti Pasar Pabean dan Pasar Marengan di Sumenep. Mereka dikenakan *wang popon* atau pajak pasar yang disewakan panembahan kepada kelas menengah pribumi bernama Samiun. Pajak pasar ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi pedagang Hadrami saja, tetapi pedagang Pribumi, Tionghoa dan pedagang Asing lainnya wajib memberikan pajak pasar dalam jumlah yang cukup besar.⁴³

Sebagai sebuah komunitas, pergantian kepemimpinan kerap kali terjadi dalam sebuah koloni Arab. Transisi ini terjadi pada 16 Mei 1859, yakni ketika Sayid Mohammad bin Ali Alhadat terpilih sebagai kepala koloni untuk menggantikan Syarif Ahmad Albakhie. Kepala koloni yang baru ini merupakan pedagang dan pengusaha pelayaran yang terkenal di kalangan orang-orang Arab di Sumenep. Pada 1869, ia tercatat telah memiliki Kapal Nawan Eljoesoer yang dinahkodai oleh Monteiro.⁴⁴ Sebagai usahawan dan pedagang besar di Sumenep membuatnya pantas menjadi kepala Arab di Sumenep selama delapan belas tahun.

Sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan komunitas Arab Sumenep, kepemimpinan Sayid Mohammad bin Ali Alhadat diteruskan oleh keturunannya yang bernama Sayid Ali bin Mohammad Alhadat pada 3 Desember 1877.⁴⁵ Dalam kasus ini, pola kepemimpinan perkampungan Arab di Sumenep didasarkan atas pewarisan keturunan. Proses pewarisan kepemimpinan ini dalam komunitas Arab di Sumenep hanya dapat dimungkinkan apabila suatu keluarga atau *fam* memiliki status sosial-ekonomi yang lebih baik dari marga-marga Arab lainnya dalam suatu koloni.

Oleh karena itu, dalam memilih seorang pemimpin, orang Arab tidak hanya memandang ciri-ciri fisik yang dapat diturunkan secara genetis, tetapi kebangsawanan dan kepemimpinan dapat diwariskan selama *fam*/marga itu dipersepsikan sebagai golongan yang unggul baik secara sosial maupun ekonomi dalam komunitas Arab.⁴⁶ Dari sini tampak jelas bahwa Alhadat pada pertengahan abad ke-19 merupakan keluarga Arab yang dominan secara sosial-ekonomi di Sumenep.

⁴³Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, 160.

⁴⁴Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869, (Batavia: Ter Landsdrukkerij), hlm. 387.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 117

⁴⁶Imam Subchi, *Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gresik: Studi Tentang Perubahan Dan Pelestarian Kebudayaan (Tesis)* (Jakarta: Program Pascasarjana, Prodi Antropologi, Universitas Indonesia, 1998), 59.

Memudarnya Hubungan Bangsawan dengan Pedagang Hadrami Pasca Sultan Abdurrahman

Pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa Sultan Sumenep memiliki minat yang cukup besar untuk belajar pengetahuan Islam kepada cendekiawan Hadrami. Hal itu dapat dibuktikan dengan keberadaan beberapa cendekiawan Hadrami yang membantu Sultan dalam mengajari keluarganya mengenai Islam. Artinya, hubungan patronase itu dilandasi oleh motif sosial-keagamaan. Dalam perkembangannya, relasi itu berubah bentuk dalam hubungan sosial-ekonomi, khususnya perdagangan.

Hubungan harmonis raja Sumenep dengan pedagang Arab hanya menguat selama tiga dekade saja, khususnya pada masa Sultan Abdurrahman. Ketika Sultan Sumenep wafat, kesejahteraan pedagang Arab di Sumenep mengalami kemunduran, tetapi bukan secara kuantitas. Artinya, dukungan sosial-ekonomi yang mereka dapatkan dari Sultan Sumenep perlahan-lahan menurun. Meskipun demikian, Panembahan Natakusuma II/Raden Mohamad Saleh Natanegara (1854-1879) selama menggantikan Sultan Abdurrahman masih memberikan tunjangan kepada cendekiawan Hadrami yang bekerja di Keraton.⁴⁷

Sumenep tidak lagi menguntungkan bagi para cendekiawan dan pedagang Hadrami pasca Sultan mangkat. Pajak perdagangan yang tinggi dikenakan kepada mereka, sehingga kekayaan mereka semakin tergerus. Oleh sebab itu, sebagian berpindah ke kota besar yang ada di Jawa, seperti Sayid Syeikh bin Ahmad Bafaqih meninggalkan Sumenep menuju ke Batavia. Perpindahan cendekiawan Hadrami ini berkorelasi dengan degradasi budaya ilmu di Sumenep. Akan tetapi, budaya ilmu yang dikembangkan oleh raja Sumenep dan cendekiawan Hadrami tidak seluruhnya hilang. Beberapa pendatang Arab baru (*wulaiti*) seperti Syeikh Khalid bin ‘Abd Allah al-Qana’i masih mengajarkan Islam. Bahkan pada 1866, ia mengarang sebuah kitab yang berjudul *Tuhfatal Ikhwani*. Terdapat juga seorang Arab-Hadrami dari kalangan budak yang pandai dalam sastra dan enam orang Arab-Hadrami campuran yang bergiat di bidang pengajaran pasca Sultan wafat.⁴⁸

Pada saat relasi paternalistik mulai memudar, beberapa beberapa para kapitalis Arab-Hadrami di Sumenep masih menjalankan aktivitas perdagangannya pada 1866. Dalam *kolonial verslag van 1866* disebutkan bahwa pedagang Arab-Hadrami memiliki kekuatan dalam melakukan resistensi terhadap kebijakan kolonial yang bersifat diskriminatif terhadap perdagangan mereka. Munculnya perlawanan tersebut disebabkan oleh pajak perdagangan yang terlalu tinggi serta kebijakan Surat Jalan yang membatasi mobilitas perdagangan mereka. Ditambah lagi, perdagangan orang-orang Hadrami di Sumenep selalu menjadi sasaran bagi

⁴⁷Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, 108.

⁴⁸Syeikh Khalid bin ‘Abd Allah al-Qana’i yang berasal dari ‘Otub, di dekat Bassora, Hadramaut menjadi pendatang baru (*wulaiti*) di Sumenep pada 1857. Berg, 151.

pengawasan polisi kolonial.⁴⁹ Adanya resistensi tersebut menandakan bahwa mereka sebagai suatu komunitas diaspora telah memiliki solidaritas sosial-ekonomi yang cukup kuat sekalipun raja lokal tidak lagi memihak.

Keretakan hubungan sosial-ekonomi Bangsawan dengan pedagang Hadrami semakin tampak pada masa kepemimpinan Pangeran Aria Mangkudiningrat (1879-1901). Hal ini disebabkan ketidaksukaan pemerintah kolonial kepada diaspora Hadrami sehingga kalangan bangsawan Sumenep enggan untuk menikahkan putrinya dengan mereka. Sekalipun keluarga Bupati Sumenep masih bersahabat dengan cendekiawan dan pedagang Arab, tetapi tidak seorang pun dari orang Arab yang berhasil mengawini putri-putri keluarga bangsawan Sumenep.⁵⁰

Kebencian pemerintah kolonial tidak cukup untuk menjelaskan keretakan relasi sosial kelas Bangsawan dengan pedagang Arab. Kenyataan lain ditemukan dalam *Babad Songgenep* (1971) bahwa memudahkan relasi keduanya disebabkan oleh perilaku ekonomi sebagian Arab yang eksploitatif dan tidak jujur. Mereka datang ke Keraton menawarkan barang dagangannya dengan harga yang terlampau mahal dan terkesan tidak jujur. Transaksi jual-beli ini tercatat dalam *Babad Songgenep* sebagai berikut: ⁵¹

Adapun Panembahan Natakusuma III itu tidak peduli pada besaran uang. Seumpama ada orang (pedagang) menawarkan barang, ditawarkan dengan harga tiga riyal (f.6) langsung mengatakan begini "Itu terlalu mahal. Biarkan jika boleh saya akan beli seharga (f.20)". Sungguh orang yang menjual barang tersebut sangat senang. Biasanya orang Arab sangat antusias melakukan perdagangan dengan Panembahan sebab banyak (orang Arab) yang menjadi kaya.

Sejak Pangeran Aria Mangkudiningrat menduduki kuasa Panembahan, orang Arab dilarang masuk ke Keraton, sebelumnya diizinkan oleh Pangeran Aria Mangkudiningrat, penyebabnya orang-orang Arab yang sama senang (berdagang) ke Panembahan, ketika sudah masuk ke Keraton sambi lalu membawa barang dagangannya. Setelah bertemu dengan Panembahan langsung ditawarkan barangnya, serta (pedagang Arab) suka memuji berlebihan barang dagangannya...dan mengatakan besar modal untuk membelinya, sesungguhnya harga f.10/sepuluh rupiah (namun) ditawarkan seharga f.300/tiga ratus rupiah. Ternyata Panembahan tidak peduli kepada jumlah uang yang besar, barang langsung diambil sesuai harga yang diucapkan pedagang Arab.

Kutipan di atas menggambarkan suatu perilaku ekonomi Arab Sumenep yang sebagian kecil bersifat eksploitatif dan tidak jujur. Realitas historis di atas

⁴⁹Kolonial Verslag van 1866, hlm. 05

⁵⁰Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, 185.

⁵¹Terjemahan Indonesia atas Bahasa Madura halus. Radin Werdisastro, *Babad Songgenep*, ed. R. Muhd. Wadji Sastranegara (Pamekasan: Tanpa Penerbit, 1971), 131.

menggambarkan sosok Arab sebagai pedagang keliling. Menariknya, mereka menjual dagangannya dengan harga yang sangat tinggi dari modal awal mereka. Ketidajujuran yang mewarnai perdagangan mereka membuat kalangan Bangsawan enggan untuk menjalin hubungan jual-beli dengan mereka. Retaknya relasi ini menjadi wajar sebab kalangan Aristokrat Sumenep menjunjung tinggi moral ekonomi masyarakat Madura yang disebut *tengka*.⁵² Dalam kosmologi ekonomi Madura, *tengka* memiliki dua asas legalitas perdagangan yakni formal dan kultural. Legal kultural ini kemudian dijunjung tinggi oleh kalangan Bangsawan dan masyarakat lokal sebab aktivitas perdagangan seringkali diwarnai dengan kecurangan dan kebohongan.

Aspek lain yang tercatat dalam teks babad tersebut adalah potret gaya hidup Aristokrat Sumenep pada akhir ke-19 yang boros dan gemar foya-foya. Mereka berani membeli suatu barang dengan harga yang melebihi harga penawaran. Perilaku yang konsumtif para Aristokrat Sumenep itu dimanfaatkan oleh pedagang Arab untuk mengakumulasi profit dari praktik perdagangan mereka yang terkesan curang, minim kejujuran, dan merugikan bagi Aristokrat Sumenep. Hal itu kemudian menjadi alasan pelarangan orang-orang Arab melakukan tindakan transaksional di Keraton Sumenep.

Meskipun keluarga bangsawan mulai tidak bersimpati kepada orang Hadrami, tetapi Sumenep tetap menarik perhatian pedagang Arab-Hadrami pada dekade terakhir abad ke-19. Dalam *besluit no. 38 tahun 1898* disebutkan seorang pendatang Arab baru bernama Syeikh Moehamat bin Said Basabeh tinggal dan berdagang di Sumenep pada Oktober 1897.⁵³ Tidak hanya Sumenep, Pamekasan—sebagai konsentrasi orang Arab terbesar kedua setelah Sumenep—menjadi tujuan ekonomi kelompok masyasyikh Hadramut seperti Syeikh Awad bin Said bin Koeddah Alomah (1892), Syeikh Achmad bin Abdullah Wahdin Basarahil (1894), Syeikh Djenit bin Mohamad Bawazir (1895).⁵⁴ Periode 1890-an merupakan titik awal bagi keterbukaan ekonomi Madura sehingga peluang itu memantik kedatangan pedagang Hadrami yang baru (*wulaiti*) ke Sumenep dan Pamekasan.

⁵²Hasani Utsman, *Tengka: Etika Sosial Dalam Masyarakat Tradisional Madura (Tesis)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 177.

⁵³Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, No. 5133/11, Bijlagen 02, Pamekasan, 6 Oktober 1897, dalam *Besluit No. 38, Buitenzorg, 9 Januari 1898*, ANRI, *Algemene Secretarie Besluit 1891-1942*, Nomor Inventaris K.87b, Nomor Arsip 559).

⁵⁴Surat izin menetapkan Sech Awad bin Said bin Koeddah Alomah dan Sech Djemit bin Mohammad Bawazir, Pamekasan, 20 April 1896, no. 1814/13, Bijlagen. 02, dalam *Besluit No. 26, Ag. 10012, Buitenzorg, 17 Augusten 1896*; Surat izin menetapkan Sech Achmad bin Abdullah Wahdin Basarahil Pamekasan, 27 Februari 1896, no. 692/13, dalam *Besluit No. 24, Ag. 7689, Buitenzorg, 18 November 1896*, (ANRI, *Algemene Secretarie Besluit 1891-1942*, Nomor Inventaris K.87b, Nomor Arsip 428 & Nomor Arsip 357).

Adaptasi dan Perilaku Sosial-Ekonomi Komunitas Arab Pasca Reorganisasi Sumenep 1883

Sejak reorganisasi Sumenep, relasi patrimonial antara Aristokrat Sumenep dengan kelas pedagang mulai terputus. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi dan diversifikasi pola pekerjaan masyarakat setempat. Beberapa pekerjaan seperti penyewa pajak dihapuskan oleh pemerintah kolonial. Kelas-kelas abdi yang berprofesi sebagai pengrajin secara perlahan mulai melepaskan diri dari subordinasi Panembahan Sumenep. Mereka mencari patron baru di pasaran kerja. Penghapusan pancen (jasa layanan kerja) juga memberikan peluang dikenalkannya sistem upah uang dan mulai terjadi perkembangan pasaran tenaga kerja.⁵⁵

Periode ini menjadi titik mula dari kebangkrutan bangsawan Sumenep. Mereka kehilangan akses terhadap pajak pertanian dan pajak usaha di desa-desa percaton dan tidak mendapatkan *pancen*. Sebagian besar bangsawan rendah dipecat dan Bupati baru sebagai keturunan raja terakhir mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah yang digaji langsung.⁵⁶ Saat itu pula raja Sumenep tidak lagi menguasai tanah-tanah di Sumenep. Sistem *landrente* diberlakukan dengan menyerankan tanah-tanah raja kepada penggarapnya.⁵⁷

Pada akhir dasawarsa abad ke-19, para pedagang (termasuk pedagang Arab) memainkan peranan penting bagi kehancuran sistem percaton. Para pedagang yang kaya akibat perdagangan lokal dan interlokal mulai membeli hak penarikan pajak pertanian, tanah, dan pasar. Hak-hak upeti telah menjadi komoditas yang dikapitalisasi, bahkan tanah-tanah *apanage* diperjualbelikan kembali. Sebagai akibatnya, elit tradisional Sumenep jatuh ke dalam cengkraman para kapital Timur Asing seperti Tionghoa dan Arab.⁵⁸

Rusaknya sistem percaton di Sumenep berimplikasi besar terhadap pergeseran kepemilikan tanah di Sumenep kepada para kapitalis Timur Asing. Tanah warisan (*tana sangkolan*) yang dominan ini banyak jatuh ke tangan pedagang Tionghoa dan Hadrami yang kaya.⁵⁹ Kelonggaran dalam sistem kepemilikan tanah di Sumenep membuka peluang bagi beberapa kapital Hadrami dan Tionghoa di Sumenep untuk bisa memiliki tanah tegalan dan pekarangan yang ada di desa-desa.⁶⁰

⁵⁵Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, 232.

⁵⁶Kuntowijoyo, *Petani, Priayi, Dan Mitos Politik: Esai-Esai Sejarah* (Yogyakarta: MataBangsa, 2016), 88, 97.

⁵⁷Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial Dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, ed. Soeno M. Abdi (Jakarta: Djambatan & KITLV, 2004), 94.

⁵⁸Kuntowijoyo, *Petani, Priayi, Dan Mitos Politik: Esai-Esai Sejarah*, 103.

⁵⁹W.B. Bergsma, *Eindresume van het bij de Gouvernements Besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 Bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Ground op Javan en Madoera*, Jilid III, *Bijlagen D*, (Batavia: Landsdrukerij, 1896), hlm. 102.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 100.

Mengenai transisi kepemilikan *tana negeri* kepada pedagang Hadrami ini terjadi di Kalianget Timur pada 1899. Dua bidang tanah di Kalianget Timur yang pada akhir abad-19 merupakan tanah negeri milik Raden Adipati Ario Pratamingkoesoemo jatuh ke tangan keluarga Arab yakni Syeikh Hasan bin Abdoellah Bagraf. Kemudian, keluarga Arab ini menjualnya kembali kepada Sayid Agil bin Hamza Yahya dan Syarifah Fatima binti Sayid Djakfar Alhadad.⁶¹

Di tengah merosotnya kaum Bangsawan, pedagang Hadrami di Sumenep bersama pedagang China tampil sebagai peminjam uang atau kreditor. Para rentenir Asing ini menyasar keluarga bangsawan Sumenep. Ketidakmampuan dalam melunasi hutang tersebut memaksa keluarga bangsawan tersebut menyerahkan saudara perempuannya kepada kreditor Hadrami.⁶² Kredit menjadi basis materiil yang diupayakan oleh pedagang Arab di Sumenep dalam bertahan di tengah perubahan. Ketika bangsawan Sumenep kehilangan akses ekonominya pasca reorganisasi, relasi Aristokrat dengan pedagang Arab bertransformasi menjadi relasi hutang-piutang.

Menurut L.W.C van den Berg, aktivitas peminjaman uang di kalangan saudagar Hadrami kepada pribumi sebagai usaha komplementer mereka seringkali disertai dengan bunga yang sangat besar.⁶³ Oleh karena itu, mereka seringkali dinarasikan sebagai “lintah darat”. Perbuatan yang melenceng dari hukum Islam ini dirilis dalam sebuah koran Arab. *Comite Almadhjar* melayangkan permohonan maaf atas tindakan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian dari bangsa Arab sekaligus memberikan kritik terhadap jurnalis-jurnalis yang melakukan *labelling* secara tidak adil.⁶⁴

Terlepas dari polemik itu, perdagangan tetap menjadi sumber ekonomi mereka. Aktivitas perdagangan (warung dan pertokoan) mereka terus bertahan di tengah perubahan sosial yang terjadi di Sumenep. Pada tahun 1890, para pedagang Hadrami mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan beras dengan memperjual-belikannya sebanyak 1000 koyang beras pertahun. Dalam kasus pertanian padi ini, pada 1890, Sumenep tidak banyak mengalami kegagalan, sehingga wilayah itu tidak memerlukan impor beras.⁶⁵

Pertumbuhan ekonomi mereka pasca reorganisasi Sumenep dapat diukur dari jumlah pajak usaha individu yang dibayarkan kepada pemerintah kolonial. Pada 1897, setiap pedagang Arab di Sumenep membayar pajak usaha sebesar f. 8.99.

⁶¹Behoorende Bij Het Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, 14 Maret 1939, No 20 dalam *Missive Gouvernement Secretaris*, No. 152, Ag. 1517/04 (ANRI, Departement van Binnenlandsch Bestuur Grote Bundel Afdeeling E 1860-1942, Nomor Inventaris K.70h, Nomor Arsip 477).

⁶²Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, 246.

⁶³Berg, *Orang Arab Di Nusantara*, 125.

⁶⁴*Lintah Darat* dalam *Almadhjar: Oentoek Kepentingan Bangsa Arab di Seloeroe Indonesia*, September 1928/Safar 1347, No. 04

⁶⁵Koloniaal Verslag van 1892, Bijlage C, N0. 22, hlm. 08.

Besaran pajak usaha individu orang Arab di Sumenep terus meningkat hingga mencapai f. 9.85 pada 1899.⁶⁶ Akan tetapi, rata-rata pendapatan ekonomi para kapitalis Timur Asing di Madura tidak lebih rendah dari pendapatan ekonomi para pedagang pribumi. Secara komparatif, pendapatan pedagang Asing berkisar satu banding sepuluh atau sepersepuluh, sedangkan pendapatan orang-orang Belanda mencapai seperlimapuluh dari pendapatan penduduk pribumi Madura.⁶⁷

Perkembangan ekonomi orang Arab dan Tionghoa mendapatkan stimulus yang cukup besar pasca liberalisasi ekonomi Madura pada akhir abad ke-19. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya suntikan modal usaha dari para importir Eropa sebanyak f10.000 setiap dua sampai enam bulan. Dalam laporan L.W.C. van den Berg, tercatat bahwa pedagang Arab-Hadrami Sumenep berhasil membangun dua belas firma dengan suntikan modal usaha sebesar f10.000.⁶⁸ Walaupun demikian, kondisi perdagangan di Sumenep tidak selalu sejahtera setiap tahunnya.

Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengembangkan bisnis perkapalan sebagai sumber ekonomi alternatif. Usaha pelayaran komunitas Arab di Sumenep sejatinya telah mengalami kemajuan pada 1866. Sayid Mohamad bin Ali Alhadat, Syeikh Achmad bin Obit Bahabbasiy, Syeikh Salim bin Obit Bahabbasiy, Syeikh Abdullah bin Oemar Bagraf, dan Syeikh Salim bin Said Achmat Amar adalah para pengusaha kapal di Sumenep.⁶⁹ Usaha itu sempat mengalami kemerosotan pada 1877-1880 karena persaingan dengan transportasi pengangkutan milik Tionghoa. Akan tetapi, pada 1890 mereka mulai menjalankan bisnis pelayaran dan perkapalan kembali berupa sekunar dan sebagian kapal uap. Usaha perkapalan mereka bahkan digunakan untuk memasuk barang-barang dagang (impor).⁷⁰

Berbagai macam usaha yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Sumenep merupakan cara mereka bertahan dan berjejaring di tengah arus perubahan sosial yang terjadi di Sumenep. Kebijakan liberalisasi ekonomi Madura oleh pemerintah kolonial pasca reorganisasi memberikan stimulus bagi orang-orang Arab untuk giat dalam berdagang dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi lainnya. Bahkan, usaha perkapalan dan pengangkutan yang dikembangkan oleh komunitas Arab di Sumenep mampu bersaing dengan usaha pengangkutan (garam) yang dimonopoli oleh *Madoera Stoomtram Maastschappij*. Mereka menetapkan tarif pengangkutan yang lebih murah daripada tarif pengangkutan perusahaan swasta Belanda.⁷¹

⁶⁶Koloniaal Verslag van 1900, hlm. 12

⁶⁷Mien Ahmad Rifai, *Lintas Sejarah Madura* (Madura: LPPM Universitas Trunojoyo & Penerbit Elmatera, 2017), 132.

⁶⁸L.W.C. van den Berg, *Le Hadhramout et Les Colonies Arabes Dans L'archipel Indien* (Batavia: Imprimerie du Gouvernement, 1886), 146–47.

⁶⁹Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869, (Batavia: Ter Landsdrukkerij), hlm. 387.

⁷⁰Koloniaal Verslag van 1892, Bijlage C, NO. 22, hlm. 08

⁷¹*Het Koloniaal Weekbald Orgaan de Vereeniging Oost en West*, Donderdag, 5 November 1903, 3de Jaargang, No. 34.

Simpulan

Awal abad ke-19 menjadi titik terbentuknya solidaritas dan komunalitas pedagang Hadrami di Sumenep. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya sebuah perkampungan Arab dengan seorang kepala koloni di Sumenep pada 1832. Eksistensi mereka di Sumenep dipengaruhi oleh relasi patronase yang terbentuk antara kelompok sayid dengan Aristokrat Sumenep, khususnya dengan Sultan Abdurrahman/Pakunataningrat (1811-1854). Relasi itu pada mulanya bersifat sosial-keagamaan semata, tetapi kemudian berkembang menjadi relasi sosial-ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelas pedagang Arab-Hadrami yang juga menawarkan barang dagangannya kepada keraton Sumenep.

Akan tetapi, pasca Sultan wafat (1854), perhatian raja Sumenep terhadap pedagang *cum* cendikiawan Hadrami mulai meredup. Akibatnya, kesejahteraan mereka pada paruh kedua abad ke-19 yang didapatkan dari raja Sumenep mulai menurun. Disamping itu, pengawasan dan pembatasan yang cukup ketat terhadap pedagang Arab di Sumenep oleh pemerintah Belanda menjadi faktor penting dari munculnya gejolak dan protes sosial dari kalangan pedagang Arab-Hadrami.

Ketika pemerintahan lokal Sumenep mulai merosot, pemerintah kolonial memberlakukan penghapusan pemerintahan swapraja. Reorganisasi itu menimbulkan berbagai macam kerugian ekonomi kelas bangsawan Sumenep yang tidak lagi memiliki akses terhadap pajak desa. Di sisi lain, pedagang khususnya di kalangan diaspora Arab-Hadrami semakin menguat di Sumenep karena beberapa firma Hadrami mendapatkan suntikan modal dari pemerintah kolonial. Mereka juga membangun relasi kapitalistik dengan bangsawan di Sumenep dalam bentuk peminjaman uang (kredit).

Terlepas dari perilaku tersebut, koloni Arab-Hadrami di Sumenep menggantungkan sumber ekonominya kepada perdagangan baik sebagai pemilik toko, pedagang besar, pedagang keliling/eceran dan sebagainya. Tidak hanya perdagangan, mereka yang menetap di pesisir—wilayah industri garam kolonial seperti Kalianget—mengembangkan usaha pengakutan dan pelayaran. Mereka yang memiliki perahu dan kapal terlibat dalam pendistribusian garam dan ekspor-impor komoditas komersil lainnya ke wilayah luar Madura.

Daftar Sumber

Arsip, Koran dan Dokumen Tercetak

- ANRI. *Arsip Madoera*. Nomor Inventaris: K.25. Nomor Arsip: No. 7
- ANRI. *Departement van Binnenlandsch Bestuur Grote Bundel Afdeeling E 1860-1942*. Nomor Inventaris: K.70h. Nomor Arsip: 477.
- ANRI. *Besluit No. 38, Buitenzorg, 9 Januari 1898*, ANRI, *Algemene Secretarie Besluit 1891-1942*. Nomor Inventaris: K.87b. Nomor Arsip: 559.
- ANRI. *Besluit No. 26, Ag. 10012, Buitenzorg, 17 Augusten 1896*. Nomor Inventaris: K.87b. Nomor Arsip: 428.
- ANRI. *Besluit No. 24, Ag. 7689, Buitenzorg, 18 November 1896*. Nomor Inventaris: K.87b. Nomor Arsip: 357.
- ANRI. *Algemenen Verslag Madoera 1893-1898, 1900-1901, 1906, 1915-1917*. Nomor Arsip 328.
- Bergsma, W.B. *Eindresumé van het bij de Gouvernements Besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 Bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Ground op Javan en Madoera, Jilid III, Bijlagen D*. Batavia: Landsdrukkerij, 1896.
- Delpher.nl. *Het Koloniaal Weekbald Orgaan de Vereeniging Oost en West*. Donderdag, 5 November 1903. 3de Jaargang, No. 34.
- Perpustakaan Nasional. *Almahdjar: Oentoek Kepentingan Bangsa Arab di Seloeroe Indonesia*. September 1928/Safar 1347, No. 04
- KITLV. Koloniaal Verslag van 1892
- KITLV. Koloniaal Verslag van 1900
- KITLV. Kolonial Verslag van 1866
- Delpher.nl. *Regerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie 1879*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Delpher.nl. *Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie 1850*. (Batavia: Ter Landsdrukkerij.
- Delpher.nl. *Regerings Almanak voor Nederlandsch-Indie 1869*. Batavia: Ter Landsdrukkerij.
- Foto Panembahan Natakusuma II dengan Sayid Syeikh bin Ahmad Bafagih diakses pada 6 Maret 2024, dari <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/>

Buku dan Artikel Jurnal

- Abd A'la, Mukhammad Zamzami, dan Nur Hidayat Wakhid Udin, dan Ahmad Fathan Aniq. "Islamism in Madura: From Religious Symbolism to Authoritarianism." *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 02 (2018): 159–93.
- Alatas, Ismail Fajrie. *What Is Religious Authority: Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah*. Edited by Ahmad Baiquni. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2024.

- Algadri, Mr. Hamid. *Islam Dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda*. III. Bandung: Mizan, 1996.
- Artono. *Komunitas Arab Di Kota Surabaya 1900-1942*. Edited by Siti Zaenatul Umaroh. Temanggung: Penerbit Kendi, 2021.
- Athoillah, Ahmad. "Pembentukan Identitas Sosial Komunitas Hadhrami Di Batavia Abad XVIII-XX." *Lembaran Sejarah* 14, no. 2 (2018): 150–70.
- Berg, L.W.C. van den. *Le Hadhramout et Les Colonies Arabes Dans L'archipel Indien*. Batavia: Imprimerie du Gouvernement, 1886.
- Berg, L.W.C van den. *Orang Arab Di Nusantara*. Edited by Rahayu Hidayat. Depok: Komunitas Bambu, 2010.
- Boomgaard, Peter. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial Dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Edited by Soeno M. Abdi. Jakarta: Djambatan & KITLV, 2004.
- Bustami, Abdul Latif. "Santri Sebagai Penguasa: Dinasti Bendara Saud Di Kasultanan Sumenep Abad XVIII." *Pesantren* VII, no. 01 (1990): 66–76.
- Clarence-Smith, William Gervase. "Entrepreneurial Strategies of Hadrami Arabs in Southeast Asia, C. 1750s-1950s." In *The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia: Identity Maintenance or Assimilation?*, edited by Ahmed Ibrahim Abushouk dan Hassan Ahmed Ibrahim. Leiden-Boston: Brill, 2009.
- Fatimah. *Sejarah Komunitas Arab Di Yogyakarta Abad XX*. Edited by Priyo Sudarmo. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2016.
- H.J. De Graaf, TH. Pigeaud. *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV Dan XVI*. Jakarta: Grafiti, 1974.
- Hidayatullah, Akmal A J I, and Yusril Fahmi Adam. "Gerakan Islam Modern Komunitas Arab Di Solo, 1912-1942." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 19, no. 2 (2022): 132–44. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2>.
- Husain Haikal. *Indonesia-Arab: Dalam Pergerakan Kemerdekaan*. Edited by Machin Muqoddam. Yogyakarta: FORUM, 2019.
- Ihsani, Aufannuha. "From The Palace-Pendopo to The Pesantren Rooms : The Dynamics of Aristocrats and a Kiai Relationship in Sumenep 1750-1950s." *Islamuna, Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 1–21.
- . *Kebangsaan Di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep Tahun 1950-an (Tesis)*. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Indonesia-Belanda, Proyek Penelitian Madura Kerjasama. *Madura III: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar 1979*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1979.
- Jonge, Huub de. *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi*. Edited by Ahmala Arifin. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- . *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.

- . *Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami Di Indonesia (1900-1950)*. Edited by Arif Bagus Prasetyo. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019.
- Karim, Abdul Gaffar. “The Pesantren-Based Ruling Elite in Sumenep in The Post-New Orde Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 03, no. 01 (2009): 97–121.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- . *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- . *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Edited by Imam Risdiyanto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- . *Petani, Priayi, Dan Mitos Politik: Esai-Esai Sejarah*. Yogyakarta: MataBangsa, 2016.
- Leunissen, Jef. “Pertanian Rakyat Di Mudara.” In *Agama, Kebudayaan, Dan Ekonomi : Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, edited by Huud de Jonge. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Mandal, Sumit K. *Becoming Arab: Creole Histories and Modern Identity in the Malay World*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.
- Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- . “Local Initiative and Government Plans : ‘Ulama’ and Rural Development in Madura Source.” *Sojourn : Journal of Social Issues in Southeast Asia* 7, no. 1 (1992): 69–94. <https://www.jstor.org/stable/4105712>.
- Masyhuri. *Menyisir Pantai Utara: Usaha Dan Perekonomian Nelayan Di Jawa Dan Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama & KITLV, 1995.
- Mobini-Kesheh, Natalie. *The Hadrami Awakening: Community and Identity in The Netherlands East Indies, 1900-1942*. New York: Southeast Asia Program Publications, 1999.
- Onghokham. *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*. Edited by JJ. Rizal. III. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2017.
- Parwoto. *Monopoli Garam Di Madura 1905-1920 (Tesis)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Pribadi, Yanwar. “Religious Networks in Madura: Pesantren , Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture.” *Al-Jami’ah* 51, no. 01 (2013): 1–32.
- . “The Suramadu Bridge Affair: Un-Bridging the State and the Kyai in New Order Madura.” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, no. 2 (2015): 233–67.

- Rabith Jihan Amaruli, Nazala Noor Maulany, Singgih Tri Sulistiyono. "Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang-Orang Arab-Hadrami Di Indonesia." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 03, no. 02 (2018): 121–32.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java Volume One*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Rifai, Mien Ahmad. *Lintasan Sejarah Madura*. Madura: LPPM Universitas Trunojoyo & Penerbit Elmatara, 2017.
- Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Bambang Puwanto. *Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model, Dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Siddiq, Akhmad. *Kristen Madura: Agama, Identitas, Dan Pergulatan Sosial*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021.
- Snellemen, Joh F. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Vierde Deel*. Leiden: Martinus Nijhoff & E. J. Brill, 1905.
- Subarkah, Amin. *Pengaruh PAN-Islamisme Terhadap Kebangkitan Golongan Arab Di Jakarta, 1901-1941 (Tesis)*. Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Subchi, Imam. *Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gresik: Studi Tentang Perubahan Dan Pelestarian Kebudayaan (Tesis)*. Jakarta: Program Pascasarjana, Prodi Antropologi, Universitas Indonesia, 1998.
- Sulasman, Rizal Nasser. "Perkembangan Komunitas Arab Di Indonesia: Studi Kasus Perkampungan Masyarakat Arab Di Pekojan Jakarta Barat Pada Tahun 1950-2018." *Historia Madania* 04, no. 02 (2020): 247–68.
- Syafi'i, Imam. *Sejarah Garam: Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1981*. Jakarta: LIPI Press, 2021.
- Tjiptoatmodjo, Fransiscus Assisi Sutjipto. *Kota-Kota Pantai Di Sekitar Selat Madura: Abad XVII Sampai Medio Abad XIX (Disertasi)*. Yogyakarta: Ilmu Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1983.
- Utsman, Hasani. *Tengka: Etika Sosial Dalam Masyarakat Tradisional Madura (Tesis)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Werdisastra, Raden. *Babad Sumenep (Babad Songgenep)*. Edited by Moh. Thoha Hadi. Pasuruan: Percetakan Garoeda, 1996.
- Werdisastro, Radin. *Babad Songgenep*. Edited by R. Muhd. Wadji Sastranegara. Pamekasan: Tanpa Penerbit, 1971.
- Wilde, Mr. A. Neijtzell de. *Inlandsche Bevolking in de Gouvernementslanden van Java En Madoera (Nijverheid, Handel, Bijdragen Aan de Gemeenschap, de Gouvernementsmonopolien, de Algemene Middelen Tot Bevordering van Den Welvaartstoestand)*. Weltevreden: N. V. Boekh Visser & Co, 1913.
- Zulkarnain, Iskandar. *Sejarah Sumenep*. Sumenep: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, 2012.